

MOHAMMAD NATSIR DALAM DINAMIKA HUBUNGAN ANTARAGAMA DI INDONESIA

Mutohharun Jinan

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos I, Pabelan Surakarta 57102
Email: mj123@ums.ac.id

Abstract: *This article discusses about the position of Mohammad Natsir in the dynamic of inter-religions relationship in Indonesia. Natsir is well-known as the public figure having a great attention to the efforts for developing the life of peaceful religions in Indonesia. The efforts can be seen from his works and ideas. Natsir asks all people and leaders to use the different religions as the potency to develop the peaceful life by having different religions. The religion Missionaries that break down the rules or government's regulation becomes the cause of the stress and inter-religions conflict. To create the peaceful life among the people with different religions, Natsir proposes the vivendummodus that consists of: the different religious-people in Indonesia should live together harmonically, tolerance and appreciative each other, having priority on national development, avoiding the religion war, and stressing on justice and religion diversity.*

Key Words: *Mohammad Natsir; inter-religions relationship; religion diversity.*

Abstrak: *Makalah ini membahas tentang posisi Mohammad Natsir dalam dinamika hubungan antaragama di Indonesia. Natsir dikenal sebagai tokoh yang memiliki perhatian besar dalam upaya membangun kehidupan keagamaan yang damai di Indonesia. Berbagai usahanya dapat dilihat dari pemikiran dan karya-karyanya. Natsir mengajak segenap pemimpin dan umat beragama memanfaatkan keragaman agama sebagai potensi untuk membangun kehidupan keagamaan yang damai. Misionaris agama-agama yang melanggar ketentuan atau peraturan pemerintah menjadi penyebab ketegangan dan konflik antaragama. Untuk menciptakan kehidupan umat antaragama yang damai Natsir mengusulkan adanya modus vivendi yang meliputi: antara pemeluk beragama di Indonesia supaya hidup berdampingan secara baik, saling menghargai dan toleransi, mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghindari terjadinya perang agama, dan menekankan keadilan dalam keragaman beragama.*

Kata Kunci: *Mohammad Natsir; hubungan agama-agama; Indonesia.*

PENDAHULUAN

Sejarah sosial masyarakat beragama di berbagai belahan dunia tidak lepas dari

konflik, baik yang bersumber dari perbedaan agama maupun yang disebabkan oleh faktor non-keagamaan seperti etnis, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.¹

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menyebabkan agama sering menjadi pemicu konflik. Pertama, agama erat berkaitan dengan persoalan keyakinan dan pandangan hidup yang paling mendasar. Muatan emosionalitas yang terkandung di dalamnya sangat tinggi, karena memang agama diyakini sebagai pedoman hidup manusia yang paling luhur. Kedua, dalam setiap agama secara doktrinal mengandung ortodoksi (nilai khas) yang berbeda dengan agama-agama lain. Ortodoksi agama-agama memperkuat eksistensi keberadaan agama itu. Ketiga, dalam setiap agama terdapat ajaran dakwah (misi) untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama kepada orang lain.²

Bagi seorang penganut agama, iman, ortodoksi dan misi harus sejalan. Misi merupakan perwujudan iman dan ortodoksi. Kegagalan dalam misi berarti kegagalan iman. Dalam masyarakat yang plural dan majemuk (khususnya kemajemukan agama) sangat potensial terjadi konflik antarumat beragama, jika masing-masing penganut agama tidak pandai mengatur hubungan antaragama.³ Usaha-usaha

untuk mengatur hubungan antarumat beragama di Indonesia telah banyak dilakukan. Bahkan sudah ada sejak zaman kerajaan pada abad-abad yang lampau, seperti yang terekam dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Usaha secara sistematis juga secara langsung ditangani oleh pemerintah. Misalnya tahun 1967 dialog untuk menumbuhkan hubungan harmonis umat beragama mulai diselenggarakan, yang diprakarsai oleh Proyek Pengembangan Kerukunan Hidup Antarumat Beragama Departemen Agama.⁴

Kendatipun telah banyak dilakukan upaya-upaya yang diprakarsai oleh pemerintah dan LSM, bukan berarti tidak memerlukan peranan tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara individual. Pemupukan kerukunan antarumat beragama tampaknya harus secara terus-menerus dilakukan setiap warga negara, baik perorangan atau kelompok. Apalagi makna kerukunan saat ini terkesan terhenti pada dimensi struktural-ideologis. Artinya, makna kerukunan yang terdapat dalam hubungan antarumat beragama sekarang ini lebih bersifat tertutup dan eksklusif. Hal ini terlihat dalam beberapa peristiwa

¹ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*, (London: Sage Publication, 1991), hlm. 63-65.

² Frithjof Schoun, *Islam dan Filsafat Perennial*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 142. Bandingkan dengan Th. Sumarthana dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001), hlm. 34-38. Dengan redaksi yang berbeda disebutkan faktor konflik agama, yaitu eksklusivitas, sikap tertutup dan curiga, keterkaitan pada simbol yang berlebihan, dan intervensi sektor lain.

³ M. Syafii Anwar, "Sikap Positif kepada *Ahl- al-Kitab*", dalam *Ulumul Quran*, No. 4, Vol. IV 1993, hlm. 3.

⁴ Lihat Umar Hasyim, *Toleransi Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antaragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm. 363. Kemudian ditindaklanjuti dialog yang dilaksanakan pada 1972/1973 dengan mengambil tempat di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. Tahun 1973/1974 diselenggarakan di Manado, Palembang, Denpasar dan Banjarmasin. Tahun 1974/1975 diselenggarakan di Kupang, Bandung, Semarang, Pontianak dan Jakarta. Tahun 1975/1976 berlangsung di Ujung Pandang, Medan, Sukabumi, Malang dan Solo. Upaya pembinaan kerukunan kemudian tidak hanya dilakukan dalam tingkat nasional tetapi dalam tingkat internasional. Misalnya pada tahun 1997 di Indonesia diselenggarakan dialog Islam dan Kristen di Jakarta dan pertemuan tokoh-tokoh dari berbagai agama yang membahas perihal agama dan perdamaian 2002 di Yogyakarta.

mutakhir yang jelas menunjukkan potensi konflik berdimensi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).

Dalam rangka menumbuhkan kerukunan antarumat beragama, peranan seorang tokoh agama sangat diperlukan. Pemikiran dan fatwa-fatwa pemimpin agama sering dijadikan pedoman bagi massa dalam melaksanakan ajaran agama. Salah seorang tokoh yang memiliki gagasan-gagasan menarik mengenai kerukunan antaragama di Indonesia adalah Mohammad Natsir.⁵ Ia tokoh yang cukup berpengaruh dalam pentas politik dan dakwah keagamaan di Indonesia. Tidak sulit menemukan jejak-jejak perjuangannya yang sampai sekarang terus dikembangkan oleh sarjana-sarjana yang mengaguminya. Artikel ini akan menjawab beberapa persoalan berikut. Bagaimana peranan Natsir dalam membangun antarumat beragama di Indonesia? Agar dapat menjawab permasalahan secara komprehensif, maka perlu diperinci menjadi beberapa pertanyaan. (1) Mengapa Natsir menggagas tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia? (2) Bagaimana gagasan tersebut diimplementasikan dalam rentang kekuasaan pemerintahan kolonial dan pasca kemerdekaan?

BIOGRAFI MOHAMMAD NATSIR

Mohammad Natsir adalah tokoh kelahiran Sumatera Barat, tepatnya ia lahir pada tanggal 17 Juli 1908 dan meninggal dunia 6 Pebruari 1993 di Jakarta pada usia 85 tahun. Berita wafatnya segera menjadi berita utama di berbagai media, baik nasional maupun internasional. Kepribadian-

nya tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia tetapi juga dikenal oleh masyarakat dunia, khususnya dunia Islam. Sepanjang hidupnya Mohammad Natsir (untuk selanjutnya disebut Natsir) aktif terlibat dalam kegiatan baik yang bersifat politik, sosial, pendidikan, dan dakwah-keagamaan.

Karirnya dalam bidang politik yang amat menonjol ditunjukkan pada saat ia memberanikan diri berpolemik dengan Presiden Sukarno tentang dasar negara. Meskipun pendiri Masyumi ini selalu beroposisi kepada Soekarno karena perbedaan pandangan dan sikap politik, tetapi hal itu tidak mengganggu keduanya dalam kapasitas sebagai Presiden dan Perdana Menteri.⁶ Karir politiknya pernah mencapai puncak kekuasaan, mulai dari menjabat sebagai ketua Masyumi, menteri penerangan, dan perdana menteri. Namun Natsir juga pernah dianggap sebagai "pemberontak" oleh Soekarno lantaran di akhir tahun 1950-an ia bergabung dengan gerakan PRRI.

Gerakan keagamaan Natsir tercatat luar biasa. Ia menjadi tonggak sejarah perkembangan Islam Indonesia. Pada tingkat nasional Natsir memegang berbagai jabatan penting dalam organisasi-organisasi keagamaan. Dia juga pendiri dan sekaligus sebagai ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) sampai akhir hayatnya. Di panggung dunia, Natsir sangat dikenal dan diakui kepakarannya. Pada 1957 ia pernah memimpin sidang Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Dunia di Damaskus, Suriah. Nama Natsir kian moncer di forum dunia Islam setelah mendirikan Dewan Dakwah. Pada 1967 ia

⁵ L. Johanes, *Bung Natsir: Menghadang Konflik Membangun Toleransi, Pemikiran Natsir Tentang Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Filsafat Driyakarya No.3, 1993.

⁶ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 79-85.

wakil Presiden *Muktamar Alam Islami* yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Pada 1969 Natsir menjadi anggota World Muslim League, Mekkah, Arab Saudi. Tiga tahun kemudian Natsir menjadi anggota *Majlis A'la al-Alam lil Masajid* (Dewan Masjid Sedunia), berpusat di Mekkah. Pada 1980 dia menerima penghargaan dari Raja Faisal dari Arab Saudi karena berjasa pada Islam. Pada 1985 menjadi anggota Dewan Pendiri The International Islamic Charitable Foundation, Kuwait. Setahun berikutnya Natsir menjadi anggota Dewan Pendiri The Oxford Centre for Islamic Studies, London, Inggris, dan anggota majelis Umana' International Islamic, University, Islamabad, Pakistan.⁷ Maka tidak berlebihan kalau Natsir ditempatkan dalam posisi sejajar dengan tokoh-tokoh dunia seperti Amir Ali, Iqbal, dan Al-Maududi dan lain-lain.⁸

Tokoh -yang dijuluki *the second grand old man-* ini kurang mendapat sambutan secara bijaksana dari pihak penguasa, pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Peran politiknya sengaja ditelikung agar tidak muncul ke permukaan. Ia ditengarai sebagai seorang politikus sekaligus fundamentalis muslim.⁹ Oleh karena sikapnya yang memegang teguh agama itu, Natsir disingkirkan dari pentas politik dengan

tuduhan hendak menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia.¹⁰

Dalam konteks demikian, secara implisit, Natsir juga disudutkan sebagai seorang tokoh Islam yang tidak toleran dengan agama-agama lain. Stereotipe yang dialamatkan kepada Natsir itu perlu diuji kebenarannya. Karena dalam karya-karyanya yang berkenaan dengan masalah hubungan antaragama ia juga memberikan gagasan-gagasan yang sangat menarik untuk dicermati guna kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.¹¹ Sebagai seorang muslim Natsir sangat kritis terhadap gencarnya arus kristenisasi yang bekerja sama dengan penjajah (Belanda). Sebagai bagian dari anak bangsa ia juga sangat peduli terhadap kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Natsir tidak belajar agama secara formal, seperti belajar di universitas atau pesantren, tetapi belajar dengan cara kontak langsung dengan ulama-ulama besar.¹² Dalam karir dakwahnya Natsir berhasil menjalin hubungan langsung dengan para ulama baik di Indonesia maupun manca negara.

Pada tahun 1938 Natsir mulai aktif dalam bidang politik dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia cabang Bandung. Dua tahun bergabung Natsir dipercaya sebagai ketua

⁷ *Majalah Tempo* Edisi 21/XXXVII/14 - 20 Juli 2008, hlm. 67.

⁸ Yusril Ihza Mahendra, "Combining Activism and Intellectualism: The Biography of Mohammad Natsir (1908-1993)", dalam: *Studia Islamika*, Vol. 2, No. 1, 1995, hlm. 111.

⁹ Charles Kurzman memberikan pandangan yang berbeda tentang sosok Natsir. Kurzman menempatkan Natsir sebagai salah seorang berpemikiran liberal yang penting dalam membangun dasar-dasar demokrasi berdasar agama di Indonesia. Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 57-69.

¹⁰ Endang Saifuddin Anshari, "Dasar Negara dalam Konstituante dan Peranan Natsir di dalamnya sebagai Penyambung Lidah Kelompok Islami" dalam Endang Saifuddin Anshari dan Amien Rais (eds.), *Pak Natsir 80 Tahun*, (Jakarta: Media Dakwah, 1988), hlm. 37.

¹¹ Lihat M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, (Bandung: Bulan Sabit: 1989). *Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama*, (Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1980), *Capita Selecta Pertama*, (Bandung: W. van Houve, 1954). *Capita Selecta Kedua*, (Jakarta: Pustaka Pendis, 1957).

¹² M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi* (Jakarta: Media Dakwah Indonesia, 1989), hlm. 29.

PII Bandung sampai tahun 1942 dan bekerja di pemerintahan sebagai Kepala Biro Pendidikan Kodya Bandung sampai tahun 1945 dan merangkap sebagai sekretaris Pendidikan Tinggi Islam di Jakarta.

Masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, Natsir tampil menjadi salah seorang politisi dan pemimpin negara, sebagaimana dikatakan Herbert Feith, "Natsir adalah salah seorang menteri dan perdana menteri yang terkenal sebagai admistratur yang berbakat yang pernah berkuasa sesudah Indonesia merdeka."¹³ Pernyataan ini juga diakui oleh Sukarno dan Hatta. Karir politiknya dinilai cukup spektakuler, hingga dipercaya sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Syahrir dan menjabat sebagai Perdana Menteri.

Masa demokrasi dipimpin Sukarno ia mengambil sikap menentang politik pemerintahan. Keadaan ini mendorongnya bergabung dengan para penentang lainnya dan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, suatu pemerintahan tandingan di pedalaman Sumatera. Tokoh PRRI menyatakan bahwa pemerintah di bawah Presiden Sukarno saat itu dianggap menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai akibat tindakan Natsir dan kawan-kawan PRRI yang sebagian besar dari Masyumi, ditangkap dan dipenjara. Natsir dibebaskan pada pertengahan tahun 1966 setelah pemerintahan Orde Baru berkuasa.

Ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa, Natsir tidak mendapat tempat dan kedudukan dalam pemerintahan. Natsir tidak diajak untuk bersama-sama memimpin negara yang baru saja mengalami pergantian. Padahal kalau dilihat dari segi kredibilitas dan kemampuannya seba-

gai negarawan tidak diragukan lagi. Ada dugaan bahwa tidak diikut-sertakannya Natsir dalam pemerintahan, karena phobia Orde Baru yang melihat Natsir pernah bercita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hal ini diperkuat dengan upaya rehabilitasi Masyumi yang dilarang.

Memahami sulitnya situasi politik demikian, Natsir memilih dakwah kemasyarakatan sebagai sarana berjuang menegakkan Islam. Bersama teman-temannya ia mendirikan lembaga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dalam lembaga ini Natsir menuangkan pemikirannya melalui berbagai media cetak dan menulis buku. Dilihat dari karyakaryanya yang tersebar dan buku-buku yang diterbitkan, Natsir memiliki perhatian dalam berbagai aspek kehidupan, politik, sosial, budaya, filsafat, agama, pendidikan dan hubungan antaragama. Natsir selain aktif dalam kegiatan dakwah, pendidikan dan politik, ia juga seorang penulis yang produktif. Natsir telah menulis 52 judul, ditulis dalam empat bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Belanda, Inggris dan Arab. Tulisannya tersebar di berbagai surat kabar maupun majalah, antara lain *Pikiran Rakyat*, *Pembela Islam*, *Pemandangan*, *Panji Masyarakat*, *Suara Masjid*, *Kiblat* dan *Media Dakwah*.

Karakteristik dari tulisan Natsir adalah bersifat polemis-dialogis. Artinya Natsir menulis suatu persoalan tertentu bertujuan untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari persoalan yang berkembang di masyarakat. Natsir sering melakukan polemik dengan tokoh-tokoh lain di Indonesia baik itu politikus maupun tokoh agama. Misalnya Natsir pernah berpolemik dengan Presiden Sukarno tentang hubungan antara

¹³ Herbert Feith, *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, (Ithaca: Cornell University Press, 1970), hlm. 102.

agama dan negara, berpolemik dengan pendeta tentang toleransi antarumat beragama. Natsir melalui majalah *Pembela Islam* menyebarkan ide-ide organisasi Persis. Persis sering mengambil sikap menantang kepada orang lain yang tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam majalahnya.¹⁴

Secara garis besar karya-karya Natsir dapat diklasifikasikan dalam lima bidang, yaitu dakwah, pendidikan Islam, filsafat, kebudayaan, politik dan kerukunan umat beragama. Kelima bidang tersebut diklasifikasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang tersebar dalam berbagai media dan berbagai kesempatan. Natsir, untuk pertama kalinya mengarang tentang hubungan antarumat beragama yang dipublikasikan dalam surat kabar adalah mengenai kritik terhadap isi khutbah pendeta Christoffel di Gereja. Karangan tersebut berbahasa Belanda, dan inti dari kritik tersebut dimuat dalam surat kabar A.I.D, sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Bandung.¹⁵

Karya natsir dalam yang terkait langsung dengan masalah hubungan antaragama adalah *Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama*, Jakarta, Media Da'wah, 1980, *Keragaman Hidup Antarumat Beragama*, Jakarta, Penerbit Hudaya, 1970. *Islam dan Kristen di Indonesia* (kumpulan karangan), Jakarta, Media Dakwah, *Asas Keyakinan Agama Kami*, Jakarta, DDII, 1984.

GAGASAN NATSIR TENTANG HUBUNGAN ANTARAGAMA

Secara sepintas Natsir, baik dia sebagai seorang politisi dan seorang ulama, memiliki perhatian yang cukup besar ter-

hadap masalah hubungan antarumat beragama. Sebagai seorang politisi muslim ia mengusulkan agar Islam menjadi dasar negara Indonesia. Tetapi usulan itu segera mendapat tanggapan dari kelompok non-muslim dan kelompok nasionalis yang tidak menyetujui. Bagi kelompok non-muslim menyetujui Islam sebagai dasar negara Indonesia berarti menyetujui lenyapnya eksistensi mereka.

Tantangan ini mendorong Natsir untuk menulis dan menjelaskan konsep Islam tentang kedudukan agama-agama, hubungan (toleransi) antarumat beragama, dan kendala-kendala yang menghadang. Oleh karena itu, tiga persoalan ini penting untuk diurai lebih jauh.

Keragaman dan Kebebasan Beragama

Islam dengan tegas mengakui kemerdekaan berpikir dan berkehendak. Islam tidak mengizinkan memaksa-maksakan agama dan kepercayaan. Sekalipun umat Islam dalam suatu tempat merupakan umat mayoritas, dilarang oleh kode etik Islam, memaksa-maksakan kepercayaan dan keyakinan agama mereka kepada minoritas yang beragama lain dari Islam.¹⁶ Mayoritas menurut umat Islam bukan untuk menindas minoritas, tapi justru untuk melindungi hak-hak mereka.

Natsir memegang prinsip itu untuk kemudian dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan. Bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam maka bukan suatu yang berlebihan kalau Islam menjadi dasar negara Indonesia. Sedangkan agama-agama lain berhak hidup berdampingan di bawah pemerintahan Islam.

¹⁴ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 269.

¹⁵ Natsir, *Kebudayaan Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: PT. Girimukti Pusaka, Cet.I, 1988), hlm. 12.

¹⁶ Natsir, *Islam dan Kristen Di Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1969), hlm. 223.

Islam mengajarkan bahwa perbedaan agama tidaklah otomatis menjadi sumber konflik dan persengketaan antarpemeluk agama. Islam juga mengajarkan bahwa dalam melakukan dakwah tidak boleh memaksa atau memakai cara-cara licik, yang mengandung unsur penipuan.¹⁷ Cara-cara seperti itu sama halnya dengan tidak menghargai kebebasan beragama dan tidak menghargai martabat manusia. Bagi Natsir dakwah harus menghormati martabat manusia sebagai makhluk Allah serta identitas sesama manusia.

Namun ditengah pluralitas itu, dapat diusahakan adanya *kalimatun sawa'* yang diharapkan dapat dijadikan landasan bersama untuk menjadi titik temu dalam memecahkan persoalan-persoalan bersama. Karena itu tidak terlalu mengherankan jika dalam perilaku politiknya, Natsir senantiasa bersedia bekerja sama dengan pihak-pihak lain, bahkan dengan kelompok bukan muslim, atas dasar kejujuran dan kemaslahatan bersama.¹⁸

Sewaktu berpidato Natsir menyatakan bahwa agama Islam memberantas sikap tidak toleran terhadap agama dan menegakkan kemerdekaan beragama serta meletakkan dasar bagi keragaman hidup antar-agama. Kemerdekaan menganut agama adalah suatu nilai hidup yang dipertahankan oleh setiap Muslimin dan muslimat. Islam melindungi kemerdekaan menyembah Tuhan menurut agama

masing-masing, baik di masjid maupun di gereja.¹⁹

Pernyataan itu menunjukkan bahwa meskipun hendak menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetap akan memegang teguh kerukunan dan menghargai pluralitas agama. Perbedaan agama-agama di masyarakat merupakan *sunnatullah* yang harus diterima oleh setiap umat beragama. Pluralitas agama juga untuk menyadarkan agar sesama manusia saling berlomba-lomba berbuat kebajikan.

Kebebasan beragama bukan sekadar berasal dari pernyataan hak-hak asasi manusia di PBB, yang baru dicetuskan beberapa tahun setelah Perang Dunia kedua, tetapi kebebasan beragama telah inheren dalam ajaran Islam sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. Ajaran itu antara lain seperti yang tertulis dalam konstitusi Piagam Madinah. Dalam konstitusi Piagam Madinah ini Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar sikap pluralisme agama, di antara warga negara yang berbeda-beda agama.²⁰

Nilai-nilai agama harus menjadi sumber inspirasi bagi setiap perilaku seorang muslim dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, budaya maupun politik. Komitmen keagamaan yang kuat demikian tidak jarang menimbulkan benturan-benturan dalam pengalaman praktis di masyarakat, apalagi dalam wilayah politik yang selalu sarat dengan kepentingan kelompok dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm., 224.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 225. Dalam praktek kehidupan sehari-hari Natsir dikenal sebagai pribadi yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan. Secara pribadi ia juga akrab dengan Kasimo (Katholik) meskipun secara ideologis keduanya berbeda.

¹⁹ Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, hlm., 200.

²⁰ Di antara bunyi Piagam Madinah yang berkait langsung dengan kebebasan beragama adalah pada pasal 25 berbunyi "Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka". Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama di Madinah. Lihat misalnya Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 161.

individual. Yang menarik dari Natsir adalah bahwa sikap pluralisme tidak berarti menghilangkan identitas seseorang dalam memeluk agama yang diyakininya. Bahkan pluralisme tanpa disertai dengan komitmen yang kuat dan identitas keagamaan akan mengakibatkan seseorang menjadi bersikap lemah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Untuk tetap menegaskan identitas diri, maka antara umat beragama harus saling hormat-menghormati, tetap berteman dan bersahabat baik.

Pandangan demikian berbeda dengan paham pluralisme yang ekstrim yang dikembangkan oleh sejumlah intelektual sesudahnya.²¹ Pluralisme ekstrim adalah suatu anggapan bahwa semua agama baik dan benar, masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dan dapat berkembang secara paralel dalam pentas kehidupan bermasyarakat. Komitmen keagamaan terhadap agamanya sendiri dan dakwah penyebaran nilai-nilai keagamaan menjadi tidak penting karena semua agama telah memiliki. Lebih dari itu, pluralisme ekstrim juga tidak menghajatkan orang berdialog antara satu agama dengan agama lain.

Menurut Natsir, dasar-dasar kemerdekaan beragama dalam Islam dilandasi dengan beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, perlu ditegaskan bahwa tauhid pada hakekatnya adalah suatu revolusi ruhani yang membebaskan manusia dari kungkungan dan tekanan jiwa dalam arti yang seluas-luasnya. Tauhid membebaskan manusia dari segala macam ketakutan terhadap benda dan takhayul dalam bentuk apapun juga. Tauhid membawa orang kepada beriman kepada Tuhan. Keimanan kepada Tuhan itu diperoleh dengan jalan yang bersih dari segala macam paksaan. Adalah *sunnatullah* bahwa suatu keyakinan

yang sebenar-benarnya keyakinan tidak dapat diperoleh dengan paksaan.

Kedua, oleh karena itu, agama yang benar-benar agama menurut Islam ialah agama yang sesuai dengan *sunnatullah* ini. Yakni tidak disebut beragama jika agama itu hanya berupa buah bibir, sekedar pemeliharaan diri dari bahaya yang bersifat eksternal, tidak tumbuh subur dalam hati yang bersangkutan.

Ketiga, dalam pandangan Islam keimanan adalah karunia Allah yang hanya dapat diperoleh dengan ajaran dan didikan yang baik, dengan dakwah dan panggilan yang bijaksana serta diskusi yang sopan dan teratur. Umat Islam berpegang kepada *khittah* memanggil orang ke jalan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran; "*Panggillah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pendidikan yang baik dan bertukar pikiranlah dengan cara yang lebih baik*".

Keempat, dalam pergaulan hidup sehari-hari, di mana perbedaan tidak dapat dipertemukan, perbedaan tentang paham, pemikiran, amal, agama dan sebagainya, maka seorang muslim tidak boleh tinggal diam dan tenggelam serta lumpuh hatinya melihat perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan tentang ibadah dan agama, tidak boleh menyebabkan putus asanya seorang muslim dalam mencari titik persamaan yang ada di dalam agama-agama. Seorang muslim diwajibkan untuk mengambil inisiatif, menjaga keharmonisan kehidupan antar-agama dengan memanggil orang-orang yang beragama lain, yang mempunyai kitab berpedoman kepada wahyu Ilahi.

Kelima, Umat Islam harus menahan diri dan tidak boleh dipengaruhi hawa nafsunya dalam menegakkan kejernihan

²¹ Raimundo Panikkar, *Dialog Intrareligius*, (terj.) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), hlm. 18.

hidup antarumat beragama. Dengan penuh keyakinan akan kebenaran yang ada pada sisinya dan keluasan dada yang ditimbulkan oleh kalimat tauhidnya.

Keenam, toleransi yang diajarkan Islam itu, dalam kehidupan antarumat beragama bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif. Toleransi harus bersifat aktif. Aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Aktif dan bersedia senantiasa untuk mencari titik persamaan antar bermacam-macam perbedaan. Bukan hanya itu, kemerdekaan beragama bagi seorang muslim adalah suatu nilai hidup yang lebih tinggi dari pada nilai jiwanya sendiri. Apabila kemerdekaan beragama terancam dan tertindas, walau kemerdekaan beragama bagi bukan orang yang beragama Islam, maka seorang muslim diwajibkan untuk melindungi kemerdekaan ahli agama tersebut agar manusia pada umumnya merdeka untuk menyembah Tuhan menurut agamanya masing-masing dan dimana perlu dengan mempertahankan jiwanya.²²

Keenam pernyataan di atas merupakan *khittah* yang hendak ditegaskan dan dilaksanakan oleh umat Islam di negara Indonesia untuk membangun kehidupan keagamaan yang baik. Ajaran itu dilaksanakan oleh umat Islam semata-mata mengharap ridha ilahi.

Dasar-dasar Kerukunan Beragama

Pandangan Natsir terhadap keberadaan agama-agama lain selain Islam dalam konteks kehidupan bermasyarakat tersebut sangat penting untuk memahami lebih jauh tentang ajakan toleransi dan kiprah serta perjuangan Natsir dalam membina kerukunan hidup antarumat ber-

agama di Indonesia. Karena tanpa adanya sikap pluralisme itu, cita-cita membangun kerukunan akan jauh dari harapan.

Bagi Natsir, kerukunan antarumat beragama merupakan syarat bagi tegaknya negara republik Indonesia yang adil dan makmur. Ia menegaskan bahwa kalau memang masyarakat hendak menjamin kemerdekaan agama dan hendak menegakkan kejernihan hidup antaragama di tengah jutaan penduduk Indonesia yang bermacam-macam agama ini, maka sebagai dasar dari kesatuan negara tidak lain adalah menyebarkan paham kemerdekaan dan toleransi sebagaimana tersebut di atas keseluruh kepulauan Indonesia. Perlu untuk dicatat bahwa sesungguhnya watak rakyat Indonesia pada dasarnya adalah bersifat *tasamuh* (toleran).²³ Toleransi yang diajarkan Islam bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif. Tetapi toleransi yang bersifat aktif. Maksudnya adalah aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Dalam Islam diajarkan kode etik positif tentang toleransi antarumat beragama yang tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh umat agama lain.

Lain halnya dengan toleransi semu atau sering disebut dengan *lazy tolerance*. Toleransi semu tidak dilandasi oleh semangat kebersamaan dan pencarian titik-titik persamaan dan perbedaan. Toleransi ini merupakan rekayasa kekuatan dari luar agama yang tujuannya untuk kepentingan non keagamaan, misalnya tujuan politik dan kekuasaan. Dengan demikian, toleransi yang terjadi bersifat pasif dan bisa membahayakan bagi kehidupan umat beragama bila kekuatan dari luar agama yang menyangga toleransi itu runtuh.

²² Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, hlm. 203-205.

²³ Natsir, *Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1983), hlm. 12.

Toleransi yang dikemukakan oleh ajaran Islam dapat memelihara dan menyuburkan keragaman dan perdamaian antaragama dalam negara Indonesia.²⁴ Menurut Natsir bentuk toleransi yang paling tinggi dalam ajaran Islam adalah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Hajj/22 ayat 40.

“Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah”.

Dalam rangka menyebarkan toleransi yang dapat memelihara dan menyuburkan keragaman dan perdamaian antaragama di Indonesia, Natsir menyarankan agar umat Islam secara aktif melakukan tiga hal. Pertama, memahami ajaran Islam secara sungguh-sungguh bagi setiap muslim. Saran ini sejalan dengan semangat aktif dalam toleransi. Bahwa tanpa ada pemahaman dan penguasaan agamanya sendiri toleransi yang ditampilkan akan semu dan mudah tergoyah oleh kepentingan-kepentingan dari luar. Kedua, menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup, baik dalam berkata maupun bertindak terhadap masyarakat di sekelilingnya. Begitu banyak ajakan

dan ajaran Islam, baik secara praktis maupun teoritis yang memberikan acuan bagaimana kita harus berdampingan dengan masyarakat yang terdiri dari beragam agama. Ketiga, memancarkan pengertian kedua hal di atas di sekelilingnya dengan tidak mengabaikan agama dan kepercayaan manapun, baik secara lisan maupun dengan perbuatan.²⁵

Di samping dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana tersebut, Ia menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar bagi semua agama untuk memilih dan menentukan kebebasan beragama. Pancasila menentukan adanya kebebasan menganut agama. Ini bukan berarti bahwa mengkristenkan orang Islam dan atau mengislamkan orang Kristen sesuai dengan Pancasila. Kalau pun mau berlomba-lomba akan mengembangkan agama masing-masing seharusnya diperuntukkan bagi orang-orang yang belum menganut agama.²⁶ Platform Pancasila menghendaki adanya saling harga-menghargai di antara agama-agama itu. Sehingga kalau ada orang Islam dibujuk untuk memasuki agama lain, demikian juga sebaliknya, adalah bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila.²⁷

Selain ajaran agama -sebagai dasar asasi- kerukunan umat beragama juga perlu didukung oleh undang-undang atau keputusan-keputusan yang disepakati bersama. Cukup banyak keputusan bersama yang mengatur hubungan antaragama. Di

²⁴ Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, hlm. 112.

²⁵ *Ibid.* hlm. 206.

²⁶ Natsir, *Mencari Modus Vivendi antarumat Beragama di Indonesia*, hlm. 7-8.

²⁷ Tentang Pancasila sebagai *platform* ini Natsir menyatakan: “Pakistan adalah sebuah negeri muslim. Demikian pula halnya Indonesia. Walaupun kami mengakui Islam sebagai agama rakyat Indonesia, namun kami tidak menyatakan secara tegas dalam konstitusi kami. Kami pun tidak menyisahkan agama dari kehidupan nasional kami. Indonesia telah menyatakan keyakinannya dalam Pancasila yang telah kami ambil sebagai dasar spiritual, moral dan etis bangsa dan negara kami.” Natsir, *Kapita Selecta*, hlm. 144-150.

antaranya adalah seruan adanya Badan Musyawarah Antar Agama pada tahun 1967. Salah satu poin anjuran pemerintah adalah satu golongan agama jangan dijadikan sasaran dakwah oleh agama lain. Selain itu juga konferensi bersama Misi Kristen dengan Dakwah Islam yang berlangsung di Genewa tahun 1976 tentang dihentikannya diakonia.

Dalam berbagai kesempatan Natsir mengemukakan bahwa cita-cita kesentosaan seluruh warga negara harus menjadi dasar dalam penegakan kerukunan. Tanpa adanya kemauan bersama untuk menegakkan kedamaian ini kerukunan umat beragama mustahil dicapai. Sebab masing-masing penganut agama akan berjuang menegakkan ajaran agamanya. Hal itu berarti, kerukunan sangat bergantung pada apakah agama-agama itu mampu menjawab masalah-masalah kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Komitmen keagamaan yang semakin dekat kepada kemanusiaan pada gilirannya akan membuahkan model hubungan yang manusiawi.

Dasar-dasar toleransi dalam Islam sebagaimana dikemukakan tersebut memperlihatkan Natsir sebagai sosok yang terbuka dalam membangun kerukunan umat beragama. Artinya landasan teologis dalam Islam cukup memberikan kerangka acuan bagi toleransi keagamaan di masyarakat

tanpa harus menempatkan agama lain dalam posisi inferior.

Kendala Hubungan Antarumat Beragama

Sebagaimana disinggung di muka bahwa bersamaan dengan marginalisasi peran politiknya yang dilakukan pemerintahan Orde Baru, Natsir mengalihkan perhatian gerakannya melalui dakwah. Salah satu gerakan dakwah yang dilakukan Natsir dan menjadi sasaran dakwahnya adalah gerakan kristenisasi telah gencar dilakukan sejak penjajahan kolonial Belanda. Sebagian besar tulisan Natsir yang berkaitan dengan hubungan antaragama yang ditulis sebelum kemerdekaan adalah polemik dengan misionaris Kristen. Bahkan tulisan-tulisan itu merupakan reaksi dan klarifikasi terhadap pernyataan-pernyataan misionaris yang melecehkan agama Islam.²⁸

Salah satu peran penting Mohammad Natsir dapat dibuktikan dalam usahanya mengatasi kristenisasi di Indonesia yang dianggap sudah melampaui batas-batas kewajaran dalam pelaksanaannya. Kegiatan tersebut antara lain mengintervensi keimanan umat Islam, misalnya dengan mendatangi rumah-rumah orang muslim, membangun gereja di kawasan umat Islam atau dengan memanfaatkan ketidakmampuan umat Islam, terutama di bidang ekonomi, seperti membagikan sejumlah materi yang

²⁸ Sejak duduk di bangku sekolah AMS tersebut, Natsir sudah mulai terlibat dalam polemik tentang pemikiran Islam. Pengalaman pertama terjadi ketika seluruh kelasnya diundang oleh guru gambar untuk menghadiri pidato seorang pendeta Kristen bernama Ds. Christoffels, tahun 1929. Pidatonya berjudul "*Quran en Evangelie*" dan "*Muhammad als Profeet*". Meskipun disampaikan dengan gaya yang lembut, Natsir melihat pidato si pendeta itu sesungguhnya menyerang Islam secara halus. Esoknya, pidato itu dimuat di surat kabar "*A.I.D.*" (*Algemeen Indisch Dagblad*). Natsir kemudian menulis artikel yang menjawab opini sang pendeta, melalui koran yang sama. Lihat dalam Anwar Harjono dkk., *Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 17. Sedangkan Ajip Rosidi mencatat bahwa tulisan ke A.I.D. tersebut bukan diterbitkan atas nama Natsir, tetapi atas nama Komite Pembela Islam. Lihat Ajip Rosidi, *M. Natsir, Sebuah Biografi* (Jakarta: Girisukti Pasaka, 1990).

menjadi kebutuhan hidup umat Islam yang tidak lebih dari *"Peaceful Aggression"*, atau penyerangan yang bersemboyan kedamaian. Selain itu terdapat kegiatan misionaris agresif lainnya yang terlihat dalam bentuk diakonia. Diakonia adalah penyalahgunaan pelayanan masyarakat dan sikap tidak toleran orang-orang Kristen terhadap umat Islam di Indonesia, misalnya dalam bentuk penawaran pekerjaan, perbaikan rumah, pelayanan kesehatan, kursus latihan gratis dan kegiatan lainnya.²⁹

Perhatian Natsir terhadap misi kristenisasi semakin besar, semenjak upaya-upaya perjuangan politiknya mulai gagal. Lantaran itu mengambil jalur perjuangan kultural/dakwah dan mendirikan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia pada tahun 1967. Pada pertengahan tahun 60-an di Indonesia sedang terjadi konflik antaragama pasca kemerdekaan. Sehingga hubungan antarumat beragama menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Metode yang dipakai Mohammad Natsir antara lain dengan melakukan tiga upaya besar yaitu Pertama, mengirimkan tenaga dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ke pelosok daerah dengan salah satu tugasnya membendung kristenisasi. Kedua, mengirim surat kepada Paus Yohanes Paulus II di Vatikan dengan permohonan membuka mata, memperhatikan kristenisasi yang tengah digencarkan di negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Ketiga, melalui metode yang dikenal dengan Modus Vivendi, yaitu upaya menciptakan kehidupan berdampingan secara damai dengan

memakai semboyan Trilogi kerukunan.³⁰

Secara lahiriah, besarnya perhatian terhadap persoalan hubungan antarumat beragama itu adalah dibentuknya lembaga Musyawarah Antaragama yang diprakarsai oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama. Natsir banyak berperan dalam dialog dan musyawarah antaragama di lembaga ini, untuk membendung arus kristenisasi. Pada saat itu hubungan antarumat beragama di Indonesia sedang mengalami penurunan yang sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya pemerintah mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan musyawarah antaragama. Berkaitan dengan derasnya arus penyebaran agama terhadap agama lain maka pemerintah menyarankan agar tidak mengajak seorang yang telah menganut agama masuk ke agama lain. Namun umat nasrani menolak seruan itu dan tidak mau menyetujui piagam dalam musyawarah antaragama.

Terhadap penolakan umat Nasrani ini Natsir menyikapi bahwa (pertama) hendaknya umat Islam harus tetap berpegang kepada akhlak mulia. Selain itu (kedua) hendaknya umat Islam berpendirian tegas menghadapi zending dan misi yang mendatangi rumah-rumah untuk memproandakan agama mereka. Bila umat Islam telah berdialog dengan baik, tetapi mereka tetap berpendirian atas misi dakwahnya, maka umat Islam harus menolak dengan tegas.³¹

Terhadap hal-hal seperti inilah, Natsir angkat bicara, yang dikenal dengan sebutan "tiga saran untuk tiga pihak". Untuk menghindari agar kejadian-kejadian sema-

²⁹ Novi Setyani, *Mohammad Natsir dan Upaya Mengatasi Kristenisasi di Indonesia*, (Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), Skripsi, Tidak diterbitkan.

³⁰ Thohir Luth, *M Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 120-123.

³¹ Dikutip dari Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antara Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm. 335.

cam itu tidak terulang lagi, ia menyarankan hal-hal berikut. Pertama, golongan Kristen – tanpa mengurangi hak dakwah mereka untuk “membawa pekabaran Injil sampai ke ujung bumi” – supaya menahan diri dari maksud dan tujuan program kristenisasi. Kedua, orang Islam pun harus dapat menahan diri, jangan cepat-cepat melakukan tindakan-tindakan fisik. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila orang Kristen dapat menahan diri. Ketiga, sementara itu, pemerintah harus bertindak cepat terhadap pihak Kristen yang telah tidak mematuhi larangan pemerintah, agar tidak timbul perasaan tidak berdaya di kalangan orang Islam, seolah-olah mereka tidak mendapat perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap rongrongan pihak lain.³²

Oleh karena itu, perlu dicari pemecahannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam rangka mencari jalan keluar ini, Natsir mengajukan perlunya umat yang beragama Kristen dan Islam sama-sama mencari jalan keluar. Jalan keluar (*modus vivendi*) yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan kehidupan berdampingan secara damai.³³ *Modus vivendi* Natsir tersebut dapat dipahami karena umat Islam di Indonesia menginginkan hal-hal berikut. Pertama, antara pemeluk beragama di Indonesia ini supaya hidup berdampingan secara baik, saling menghargai dan toleransi. Kedua, agar semua agama di Indonesia merasakan arti hidup intern umat beragama dengan pemerintah. Ketiga, terwujudnya perdamaian antar-masyarakat yang berbeda agama di negara ini dengan kepentingan pembangunan nasional. Keempat, menghindari terjadinya

perang agama sebagaimana yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia ini. Kelima, tidak kalah pentingnya adalah mengajak semua manusia dengan perbedaan agama masing-masing untuk mengamalkan salah satu perintah agama yang paling esensial, yaitu keadilan dalam keragaman beragama.

Upaya Natsir tersebut patut dihargai oleh pemerintah dan semua umat beragama di Indonesia, karena upaya tersebut menyangkut pemeliharaan stabilitas dan kelanjutan pembangunan nasional. Dengan demikian, baik pemerintah maupun masyarakat melalui tokoh-tokoh agama masing-masing, memperhatikan secara sungguh-sungguh. Sebab, hanya dengan modal mengamalkan trilogi kerukunan, masyarakat bangsa Indonesia dapat hidup damai. Pada dasarnya secara konseptual telah banyak aturan mengenai hubungan antarumat beragama terutama berkaitan dengan penyebaran agama. Hanya saja dalam praktik pelaksanaan aturan di masyarakat masih perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

NATSIR DAN POLITIK HUBUNGAN ANTARAGAMA

Di atas telah diuraikan gagasan-gagasan Natsir tentang hubungan beragama, dasar-dasar dan hambatan kerukunan beragama. Tampak bahwa semangat hidup berdampingan antarumat beragama bagi Natsir merupakan suatu ajaran luhur dalam Islam. Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa pengakuan keberadaan agama-agama lain di masyarakat menjadi dasar bagi tegaknya sebuah negara. Prasyarat

³² *Mimbar Demokrasi*, No: 85, Th. III, minggu III, Mei 1969. Juga dimuat dalam Natsir, *Mencari Modus Vivendi antarumat Beragama di Indonesia*, hlm. 24.

³³ Natsir, *Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama di Indonesia*, hlm. 24.

untuk menumbuhkan pluralisme adalah memahami dan komitmen terhadap agamanya sendiri. Komitmen ini mengharuskan adanya kebebasan menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Tanpa adanya kebebasan menjalankan ajaran agama sulit rasanya membangun kerukunan hidup bersama.³⁴

Untuk itu, yang menjadi dasar bagi tegaknya kerukunan adalah kemampuan penganut agama menggali dan memahami ajaran agama. Bila disistematisasikan dasar-dasar kerukunan umat beragama terdiri dari dua macam, yaitu dasar-dasar teologis dan landasan yuridis. Landasan teologis kerukunan merupakan turunan dari teks-teks sumber ajaran agama dan perilaku pemimpinya. Sedangkan landasan yuridis adalah hasil kesepakatan dari semua pihak termasuk pemerintah yang mengatur jalannya kehidupan antarumat beragama.

Hanya saja, pada tahap implementasi semangat toleransi, kebebasan dan keyakinan teologis itu sering mendapat hambatan yang tidak sederhana. Karena itu pada tahapan praktis hubungan antarumat beragama perlu terus mendapat pengawasan secara ekstra lantaran persoalan konflik antarumat beragama muncul ketika penganut agama mendakwahkan agamanya kepada orang yang sudah beragama secara paksaan di masyarakat. Menjembatani persoalan ini, Natsir mengajak agar dijunjung tinggi kode etik penyiaran agama. Kode etik itu antara lain: keyakinan agama tidak boleh (dan memang tidak bisa) dipaksa-paksakan, dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan, dakwah harus dilakukan dengan pendidikan yang baik, dan dak-

wah dilakukan dengan bertukar pikiran dengan cara yang terbaik.

Bersinggungan dengan agama lain merupakan keniscayaan dalam zaman yang mengecil ini. Karena itu, yang dibutuhkan adalah saling menghormati identitas pemeluk agama lain, sambil memperkaya variasi dakwah guna meningkatkan kualitas keagamaan umat. Kiprah Natsir, secara periodik, dalam mengupayakan terciptanya kerukunan umat beragama dapat ditempatkan kedalam tiga periode penggalan sejarah bangsa Indonesia, yaitu pada masa kolonial, Orde Lama dan Orde Baru dapat dibagi dalam tiga periode

Pada masa kolonial problem keagamaan yang muncul disebabkan oleh gerakan misi keagamaan. Bagi Natsir misi Kristen di Indonesia telah lama mengganggu hubungan antarumat beragama di Indonesia. Misi Kristen di Indonesia pada masa kolonial merupakan perpanjangan dari kolonialisme. Oleh karena itu, pendirian gereja-gereja Kristen di Indonesia dipandang dengan sikap ambivalen oleh umat Kristen. Perasaan beragam ini terutama berasal dari kenyataan bahwa selama waktu itu para pastor adalah pejabat negara yang digaji pemerintah kolonial. Di samping itu, banyak sarana-sarana misi demi penyebaran agama Kristen diterima dengan baik oleh penguasa kolonial. Sejumlah fasilitas diberikan untuk misionaris, termasuk subsidi dan bantuan keuangan serta pembebasan pajak.

Kerja sama saling menguntungkan antara kolonial dengan misi Kristen tersebut sangat melukai hati umat Islam. Natsir sebagai tokoh muda yang memiliki perhatian besar terhadap Islam sangat

³⁴ Penghormatan terhadap Natsir masih terus mengalir, pengaruhnya menancap kuat pada generasi hingga hari ini. Pada tahun 2008 diselenggarakan serangkaian seminar untuk mengupas peran dan perjuangan Natsir bagi bangsa Indonesia. Makalah dan komentar seminar dibukukan, lihat Taufik Abdullah dkk. 100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah, (Jakarta: Republika, 2008).

tepanggil untuk mengajak umat Islam menghapus ketidakadilan itu. Hal ini tampak dari tulisan-tulisan di media dan ceramah-ceramah Natsir yang didokumentasikan pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Tidak sulit menemukan kritik-kritik tajamnya terhadap kebijakan penjajah yang merugikan umat Islam di Indonesia.³⁵

Kebijakan-kebijakan kolonial yang menyudutkan umat Islam dan memberi peluang terhadap perkembangan kristenisasi sebagaimana disebutkan di atas merupakan faktor penting kecurigaan dan konflik antarumat beragama, terutama Islam dan Kristen. Memang ada upaya untuk mendamaikan kedua agama ini, tetapi upaya itu sebatas hubungan yang bersifat pribadi antarpemuka agama dan tidak sampai pada kebijakan agama secara kelembagaan.

Yang dapat dilakukan Natsir dalam menyikapi misi agama Kristen adalah menyebarkan tulisan melalui media cetak, menghadiri konferensi internasional, dan mengirim seruan kepada tokoh agama Kristen. Tulisan-tulisan Natsir sebagian besar sangat polemis dan tidak jarang menggunakan bahasa yang hiperbolis. Hal ini dilakukan karena Natsir memberi reaksi atas pernyataan pihak agama lain dan penjajah yang tidak bersikap toleran terhadap umat Islam. Natsir juga memberi reaksi secara tertulis terhadap kejadian-kejadian pemurtadan yang dilakukan oleh pihak Kristen terhadap umat Islam.

Pasca kemerdekaan (Orde Lama) problem kerukunan umat beragama di

Indonesia tak kunjung terpecahkan. Bila pada masa sebelumnya ketegangan konflik agama terjadi dibawah kebijakan kolonial, maka pada masa kemerdekaan persoalan lebih rumit. Ketegangan dan konflik antaruma beragama setidaknya terjadi dalam aras konstitusi dan aras masyarakat. Diketahui bahwa tidak lama setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan mengenai dasar negara. Persoalan muncul di seputar apakah Indonesia harus menjadi sebuah negara Islam atau negara kesatuan yang memisahkan urusan negara dari Islam. Sebagian besar pemimpin dari kalangan Islam menyatakan dukungan atas gagasan Indonesia menjadi negara Islam. Tetapi kelompok nasionalis dan kalangan non-muslim menolak secara tegas gagasan itu.

Sebagai pendukung terdepan Islam sebagai dasar negara, Natsir banyak memberikan uraian dan penjelasan mengenai Islam tentang toleransi dan penjaminan terhadap kelompok minoritas. Pidato-pidato Natsir, baik di Parlemen maupun di luar, selalu saja terkait dengan pentingnya kerukunan umat beragama dalam bentangan negara Republik Indonesia. Salah satu harapan Natsir adalah agar Piagam Jakarta dimasukkan sebagai landasan konstitusi negara. Untuk mewujudkan harapan ini Natsir melakukannya melalui berbagai upaya, baik melalui Masyumi maupun upaya non-politik.³⁶

Harus diakui bahwa persoalan dasar negara ini menyulut kontroversi di kalangan para pemimpin Indonesia pada masa itu, terus dirujuk dalam hampir setiap perdebatan antarumat beragama, terutama

³⁵ Misalnya Natsir mengkritik Bousquet (seorang guru besar hukum Islam Belanda) yang menyatakan bahwa kebijakan penjajah Belanda terhadap umat Islam sangat lunak, dan hal itu akan membahayakan koloni dan kristenisasi di Indonesia. Bagi Natsir pernyataan ini jelas menyulut api perpecahan. *Panji Islam*, No. 51 Tahun 1939.

³⁶ Kholid O. Santosa, *Dasar Negara Islam Indonesia: Pemikiran, Cita-Cita dan Semangat Nasionalisme Mohammad Natsir*, (Bandung: LP2EPI, 2002), hlm. 190.

Muslim-Kristen. Perdebatan tentang dasar negara (Piagam Jakarta) ini menjadi tanda ketegangan pertama dalam hubungan antarumat agama pasca penjajahan, sebuah perdebatan yang hampir merusak persatuan dan kesatuan negeri Indonesia.

Bersamaan dengan surutnya pentas Natsir dalam panggung politik, oleh karena Masyumi dibubarkan dan dipersempit ruang gerak politiknya oleh penguasa, maka surut pula peranannya dalam menebarkan kerukunan umat beragama melalui jalur politik. Ini bukan berarti ia berhenti sama sekali membangun kerukunan. Melalui karya-karyanya dan pendidikan yang mulai dirintis Natsir tetap menyuarakan pentingnya kerukunan. Kemudian diperkuat dengan pembentukan lembaga dakwah yang mengawasi proses penyebaran agama di Indonesia.

Satu tahun setelah tumbanganya Orde Lama dan digantikan dengan Orde Baru (tahun 1967), Natsir dan tokoh-tokoh Islam lain di Jakarta mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Lembaga ini merupakan jalur dakwah Natsir dalam membina kerukunan umat. Pada saat itu ketegangan antarumat beragama mencapai titik kulminasi dan sangat mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa ini.

Pasca gerakan revolusi dan tumbanganya PKI dianggap kalangan Kristen sebagai masa yang penuh berkah bagi pertumbuhan agama Kristen di Indonesia. Orang-orang memeluk agama Kristen karena

gereja menawarkan perlindungan bagi mereka yang dicurigai terlibat dalam kegiatan komunisme di Indonesia. Karena itu, perdebatan dan polemik pun berlangsung panas antara kelompok Kristen dan muslim, seolah-olah benih konflik itu telah bertabur oleh kontroversi mengenai hak mengajak umat beragama lain pindah agama. Di satu sisi umat Kristen percaya bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menganut atau berganti jika ia menghendaki demikian. Bagi kaum muslim, di sisi lain, mengajak orang lain pindah agama hanya menyebabkan lahirnya permusuhan dan ketegangan di kalangan umat beriman.

Berkaitan dengan itu, melalui lembaga yang dibentuknya, Natsir semakin banyak menulis dan mempublikasikan gagasan tentang bagaimana sikap umat Islam. Selain bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, DDII yang dipimpin Natsir menggelorakan agar umat Islam tetap menjaga ukhuwah dan mewaspadaai terjadinya konflik antarumat beragama. Tidak pernah ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa Natsir mengajak umat Islam untuk bersikap keras terhadap orang Kristen, apalagi megngobarkan anarkisme seperti pembakaran Gereja.³⁷

Pada masa awal konsolidasi Orba tampak bahwa konflik antarumat beragama tidak terjadi dalam perebutan peranan dalam pengambilan keputusan politik seperti yang dilakukan oleh para

³⁷Anggapan DDII yang dibentuk Natsir sebagai lembaga dakwah untuk menentang giatnya kristenisasi ditanggapi oleh Amien Rais dan Yusril Ihza mahendra bahwa dakwah sudah mendarah daging dalam tubuh Natsir. Penyebaran Kristen tak menjadi faktor penting, meski sikap keras Natsir terhadap Gereja tampak menjelang kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia Pada 1989. Ia bersama Ra-sjidi, KH Masjkur, dan KH Rusli Abdul Wahid mengirim surat ke Vatikan. Isinya, meminta Paus tidak menyalahgunakan diakonia, pelayanan masyarakat, untuk mengkristenkan orang. Pada 1976 pemimpin Islam, Katolik, dan Kristen dalam konferensi internasional tentang misi Kristen serta dakwah Islam di Chambessy, Swiss, sepakat untuk tidak saling memurtadkan. Majalah Tempo, Edisi 21/XXXVII/14 - 20 Juli 2008.

politisi atau pemuka agama melalui jalur-jalur politik di masa Orla. Tetapi berbagai publikasi bernada apologetis dan polemis juga mewarnai konflik antarumat beragama. Natsir dan kaum muslim menerbitkan buku-buku yang berisi tentang pandangan kaum muslim terhadap agama-agama lain.

Di samping itu, publikasi itu juga untuk memberikan dorongan agar kaum muslim tetap memegang teguh agamanya ketika berhadapan dengan penetrasi kuat misi Kristen. Sebaliknya kaum Kristen juga menulis buku-buku yang isinya menyalahkan ajaran-ajaran Islam dan membuka kepalsuan ajaran Islam. Dengan kata lain, ketegangan dan konflik terjadi secara intelektual dan polemis melalui penerbitan meskipun belum sampai pada tahap ilmiah seperti saat sekarang. Dan disini Natsir, lagi-lagi menjadi pemimpin Islam yang sering kali menjadi rujukan.

Ketika ketegangan itu mencapai tingkat yang tidak bisa dikendalikan lagi, konfrontasi fisik dan aksi-aksi perusakan terhadap fasilitas keagamaan pun tidak bisa dihindari. Natsir segera terlibat dalam upaya-upaya musyawarah antarumat beragama. Upaya musyawarah antaragama pertama kali pada 30 Nopember 1967 ketika pemerintah memprakasai pertemuan antarumat beragama. Para wakil semua agama besar terutama Islam -kecuali Kristen- berhasil menyepakati ketetapan, yang dengan ketetapan itu kegiatan misio-naris, yang ditujukan kepada penganut agama dilarang serta beberapa kode etik penyiaran agama.

Pemerintah juga mengeluarkan keputusan Nomor 70 tahun 1978, Menteri Agama mengarahkan supaya para penyebar

agama tidak melakukan penyebaran agama mereka pada kalangan yang sudah menganut agama. Seruan agama hendaknya ditujukan kepada umat seagama atau kepada masyarakat yang belum beragama. Terkait dengan ajakan Natsir itu, pemerintah juga telah menekankan pentingnya tiga kerukunan, yaitu kerukunan umat beragama dalam intern agama, kerukunan umat beragama yang berbeda agama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.³⁸

Dapat ditarik sebuah ambiguitas bahwa Natsir tampaknya sangat antusias mengusahakan agar trilogi kerukunan itu benar-benar terlaksana secara nyata, bukan sebagai hiasan bibir belaka. Hanya saja, Natsir lupa bahwa kepentingan tertanam (*vested interest*) pada masing-masing umat beragama dan semua kekuatan yang ada dalam masyarakat itu pada dasarnya ingin menguasai, ingin menang, dan ingin dikatakan paling baik. Dengan demikian, sikap ingin menguasai sulit dihindari, bahkan sering menjadi motivasi utama bagi masing-masing pihak untuk mengalahkan pihak lain. Hal inilah yang kurang diperhitungkan Natsir sehingga apa yang dilakukannya dalam banyak hal, ada yang menjegal. Akibatnya, keinginan Natsir tidak semua terpenuhi sebagaimana yang diharapkannya. Bahkan, yang terjadi malah sebaliknya. Natsir terkesan hanya memperhitungkan kuantitas umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini. Secara politis, umat Islam yang mayoritas itu tidak mempunyai kualitas yang bisa diandalkan sehingga bukan merupakan hal yang baru, meskipun dari segi jumlah umat Islam di negeri ini merupakan mayoritas, tetap saja pengaruhnya terasa sebagai minoritas.

³⁸ *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, tahun anggaran 1982/1993, hlm. 13.

Di tengah runyamnya hubungan antarumat beragama pada masa Orba, Natsir masih mengusulkan agar terjadi titik temu agama-agama. Maksudnya bukan penyatuan agama-agama atau sinkretis, tetapi setiap agama bisa menggarap proyek yang sama yaitu memulihkan akhlak dan kesusilaan warga negara. Natsir mengingatkan alangkah baiknya di kalangan antarumat beragama muncul kesadaran bahwa sebagai umat beragama bersama-sama menanggulangi pemulihan hidup berakhlak dan bermoral dalam masyarakat. Ini lebih menguntungkan dan bermanfaat dari pada saling menjadikan sasaran satu sama lain.³⁹ Dalam hal ini Natsir berusaha memberi makna yang lebih jauh dari hubungan antarumat beragama yang tidak hanya terbatas pada kerukunan, tetapi kerja sama menuntaskan masalah sosial yang dihadapi oleh bangsa secara keseluruhan. Ini merupakan gagasan yang sangat maju bila dibandingkan dengan kondisi di mana masyarakat masih diselimuti sikap apologetis.

Selain untuk mencegah dekadensi moral, kerja sama agama-agama juga diperuntukkan memerangi ateisme, sebagai paham yang menolak keberadaan Tuhan. Ateisme menjadi paham yang menghambat bagi pemulihan kesusilaan dan budi pekerti yang sesuai dengan sifat warga negara Indonesia yang dikenal kental religiusitasnya. Kiprah Natsir sebagaimana diuraikan di atas cukup membukakan mata umat beragama bahwa ia memang memiliki perhatian besar dalam masalah hubungan antarumat beragama. Gagasan-gagasan dan usahanya turut mepenga-

ruhi kebijakan pemerintah dan hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Secara politik, Natsir menggagas persoalan hubungan antaragama ini merupakan salah satu bagi dari tujuan politiknya yaitu menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tujuan ini akan dapat tercapai apabila umat Islam mampu menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Islam adalah agama toleran yang melindungi umat agama lain. Hal ini ditempuh Natsir agar umat agama lain tidak takut dan khawatir akan keselamatannya bila Islam menjadi dasar negara Indonesia.

NATSIR, MUKTI ALI DAN CAK NUR: UNTAIAN REFLEKSI

Bersamaan dengan kiprah Natsir, pada tahun 1970-an juga ada gagasan besar untuk membina dan mengarahkan hubungan antarumat beragama yang harmonis dan toleran. Upaya ini antara lain dilakukan oleh Mukti Ali yang mendirikan jurusan Ilmu Perbandingan Agama di fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta.⁴⁰ Ini tentu saja melengkapi upaya Natsir dan tokoh-tokoh lainnya.

Ada perbedaan yang cukup mendasar antara gagasan Mukti Ali dengan Natsir. Dari ruang lingkupnya Mukti Ali mengkaji masalah-masalah keagamaan secara akademis karena memang dilakukan di Universitas. Lingkup akademis ini membawa pada suasana yang lebih toleran dan mudah untuk mendamaikan umat beragama di tingkat elit agama. Selain itu, metode dan pendekatan membangun hubungan antarumat beragama secara

³⁹ Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, hlm. 235.

⁴⁰ Perbandingan Agama bukanlah apologi. Tetapi ia merupakan sarana untuk memahami fungsi dan sifat agama, melihat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan unsur fundamental agama agar bisa saling memahami agama lain. Tentang upaya Mukti Ali ini lihat misalnya: *Ilmu Perbandingan Agama: Sebuah Pembahasan tentang Methodos dan Sistema*, (Yogyakarta, NIDA, 1975).

ilmiah (*scientific*). Keadaan demikian mendukung untuk terciptanya hubungan dalam satu semboyan “setuju dalam ketidaksetujuan” (*agree in disagreement*) sebagaimana yang diproklamirkan Mukti Ali.⁴¹ Natsir tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mukti Ali. Natsir lebih bersentuhan langsung dengan problem keumatan di tingkat masyarakat, mulai dari tingkat *grassroot* sampai elit, melalui penyebaran para mubaligh dan berjuang lewat jalur struktural konstitusional.

Apa yang ditempuh Natsir juga berbeda dengan cendekiawan muslim generasi sesudahnya seperti Nurcholish Madjid”. Cak Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid) menggarap kerukunan umat beragama pada level masyarakat menengah dan kalangan urban, muslim kota. Di yayasan Paramadina yang ia dirikan, menyelenggarakan kajian-kajian keagamaan keislaman yang menekankan warna Islam keindonesiaan. Selain kajian intensif, Cak Nur juga menerbitkan buku-buku yang bertema seputar pluralisme, toleransi dan hubungan antarumat agama.

Sudut pandang tentang posisi agama antara Natsir dan Cak Nur barang kali yang membedakan model perjuangan membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Bagi Natsir agama adalah ideologi yang harus diperjuangkan dalam segala aspek kehidupan. Sementara Cak Nur mengatakan bahwa agama bukan ideologi tetapi lebih tinggi dari ideologi. Bahkan harus menjadi sumber ideologi

bagi pemeluk agama. Tetapi agama sendiri tidak boleh didegradasikan sebagai ideologi.⁴²

Perbedaan tersebut tentu sangat mudah dipahami karena masing-masing hidup dan berhadapan dengan zaman dan problem yang berbeda. Meminjam formulasi Kuntowijoyo, produktifitas Natsir memuncak saat-saat umat Islam hidup di zaman ideologi, zaman di mana Islam diperjuangkan sebagai ideologi. Masyumi (Natsir sebagai ketuanya) adalah prototipe sempurna dari Islam dalam periode ideologi. Sedangkan saat ini umat Islam hidup dalam periode ilmu. Maksudnya Islam berkembang bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan semakin banyak dan beragam disiplin, sehingga terjadi proses ambil-alih substansi dan metodenya, sebelum akhirnya diberi substansi keislaman.⁴³ Namun demikian, keduanya (Natsir dan Cak Nur) boleh dibilang saling melengkapi satu sama lain dalam proses pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Melihat banyaknya pemikiran dan karya Natsir jelas berpengaruh banyak kepada intelektual muslim sesudahnya. Bahkan hingga sekarang pemikiran Natsir masih terus diperjuangkan oleh para pengagumnya. Ini menunjukkan bahwa tokoh –yang oleh Moehamad Roem- disebut sebagai *the spiritual leader* umat Indonesia ini telah meninggalkan banyak hal yang berharga dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam pembangunan kerukunan umat beragama.

⁴¹ Prof. Dr. Mukti Ali adalah Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah menjadi anggota beberapa organisasi nasional dan internasional antara lain, Dewan Riset Nasional, Komite Kebudayaan UNESCO (Paris), Dewan Penasehat National Hijra Council (Pakistan) dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.

⁴² Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 93.

⁴³ Kuntowijoyo, *Periodesasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi dan Ilmu*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, 2001. Periodesasi sejarah umat terbagi dalam tiga periode, yaitu mitos, ideologi dan ilmu.

Natsir tidak hanya berkata-kata tetapi ia juga secara langsung terlibat dalam berbagai upaya pembinaan hubungan umat beragama di Indonesia.

Sikap toleran ditunjukkan Natsir bukan hanya dalam pertemuan lintas agama, tetapi juga ditunjukkan dalam perilaku politiknya di Parlemen. Ia seorang petinggi Masyumi, partai politik Islam modern pada masanya, tetap bisa menjalin hubungan persahabatan dengan I.J. Kasimo -petinggi Parkindo. Kendati berbeda aliran ideologi-politik, namun bukan menjadi kendala bagi keduanya untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Indonesia.⁴⁴

PENUTUP

Menurut Natsir, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menghargai adanya pluralitas agama yang didasari oleh komitmen terhadap agamanya sendiri. Keberadaan agama-agama lain merupakan ketetapan Allah. Islam juga menekankan prinsip kebebasan beragama, tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu, Islam memberi bimbingan yang sangat luhur agar antarumat beragama hidup berdampingan yang dilandasi dengan semangat kerukunan/toleransi secara aktif dan kebersamaan.

Bagi Natsir, kerukunan antarumat beragama di Indonesia mutlak diperlukan, betapapun itu sulit untuk dilakukan. Ia menyadari bahwa setiap pemeluk agama memiliki kewajiban untuk mendakwahkan dan menyebarkan agamanya masing-masing. Untuk itu Natsir tidak melarang misi agama-agama apapun sepanjang tidak merugikan pihak-pihak lain. Dalam keadaan demikian justru yang diperlukan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan.

Kerukunan yang tercipta atas dasar kesalingpahaman antarumat beragama oleh Natsir disebut kerukunan aktif (toleransi aktif). Kerukunan yang di dalamnya seorang penganut agama dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya tanpa mengganggu pemeluk agama lain.

Prinsip toleransi itu menjadi kerangka acuan Natsir dalam keterlibatannya membangun kerukunan umat beragama. Peranan Natsir dalam membangun kerukunan dapat dibagi kedalam tiga periode sesuai dengan periode kehidupannya. Pertama, berhadapan dengan kebijakan Belanda yang merugikan umat Islam karena memberi ruang lebar bagi penyebaran agama Kristen. Pada periode ini pemikiran Natsir dicurahkan untuk kepentingan membendung ketidakadilan itu dan menghambat kristenisasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan dakwah Islam. Selain mengharapkan dihentikannya penyebaran agama yang tidak wajar ia juga mengajak untuk hidup bersama melawan penjajahan.

Kedua, peran Natsir dalam pembangunan kerukunan umat tidak sebatas membendung kristenisasi, mensosialisasikan gagasan tentang toleransi dan keharmonisan. Yang paling menonjol adalah perjuangan membangun kerukunan itu dilakukan melalui jalur konstitusi politik (di parlemen) dengan mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Tetapi usulan Natsir menjadikan Islam sebagai dasar negara ini pada realitasnya kontra produktif dengan seruan Natsir untuk membangun kerukunan umat beragama. Bersamaan dengan itu, secara politik praktis perjuang Natsir terhenti.

Ketiga, pada 25 tahun terakhir, kehidupan Natsir diabdikan untuk kepentingan

⁴⁴ <http://pustakadigital-buyanatsir.blogspot.com/2010/07/fatwa-keemasan-buya-natsir-tentang.html>. Diakses tanggal 27 Nopember 2014.

dakwah Islam. pada periode ini Natsir banyak terlibat dalam pembangunan kerukunan baik melalui dakwah secara langsung di masyarakat maupun menghadiri forum-forum yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka dialog antarumat beragama.

Dalam setiap upaya membangun kerukunan Natsir menyadari adanya hambatan yang permanen, yaitu hambatan

teologis. Hambatan teologis yang maksud pemahaman yang salah terhadap dorongan agar setiap pemeluk agama menyebarkan ajaran agamanya kepada orang lain. Dakwah dan misi akan menjadi hambatan kerukunan tatkala dakwah atau misi agama itu diarahkan kepada pemurtadan. Oleh karena itu, Natsir mengusulkan agar dakwah lebih diarahkan kepada peningkatan keimanan dalam agamanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. dkk. 2008. *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah*, Jakarta: Republika.
- Ali, Mukti. 1975. *Ilmu Perbandingan Agama: Sebuah Pembahasan tentang Methodos dan Sistema*, Yogyakarta, NIDA.
- Anshari, Endang Siafuddin dan Amien Rais (eds.), 1988. *Pak Natsir 80 Tahun*, Jakarta: Media Dakwah.
- Anwar, M. Syafii. 1993. "Sikap Positif kepada *Ahl- al-Kitab*", dalam *Ulumul Quran*, No. 4, Vol. IV .
- Departemen Agama, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Protek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, tahun anggaran 1982/1993.
- Feith, Herbert. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Itaca: Cornell University Press.
- Hasyim, Umar. 1991. *Toleransi Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antaragama*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina.
- Johanes, L. 1993. *Bung Natsir: Menghadang Konflik Membangun Toleransi, Pemikiran Natsir Tentang Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Jurnal *Filsafat Driyakarya* No.3.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo 2001. *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi dan Ilmu*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.